

Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Asahi Group

Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Asahi Group (selanjutnya disebut "Prinsip-prinsip ini") adalah landasan dasar dari semua kegiatan usaha kami. Prinsip-prinsip ini didasarkan pada Kebijakan Dasar Kebersinambungan Asahi Group, Kode Etik Asahi Group dan Filosofi Asahi Group, serta mengatur segala kebijakan-kebijakan terkait hak asasi manusia di dalam Asahi Group.

Prinsip-prinsip ini berlaku untuk segenap pejabat dan karyawan masing-masing perusahaan Asahi Group¹. Kami juga mengharapkan mitra bisnis kami, termasuk para pemasok kami, untuk memahami dan menjunjung tinggi Prinsip-Prinsip ini serta bekerja sama dengan kami untuk memastikan bahwa bisnis kami telah mematuhi Prinsip-Prinsip ini.

Dewan Direksi Asahi Group Holdings, Ltd. bertanggung jawab untuk memastikan ketaatan komitmen kami terhadap hak asasi manusia, dan memiliki tanggung jawab untuk mengawasi penerapan komitmen ini.

Komitmen untuk Menghormati Hak Asasi Manusia

Kami menyadari bahwa kegiatan usaha kami dapat memiliki dampak yang berpotensi dan nyata terhadap hak asasi manusia, mulai dari penelitian, pengembangan, dan pengadaan hingga pemberian produk dan layanan kami.

Kami berkomitmen untuk menghormati hak asasi manusia yang diakui secara internasional dan diatur dalam Piagam Hak Asasi Manusia Internasional² serta prinsip-prinsip ini mengenai hak-hak mendasar dalam Deklarasi Organisasi Buruh Internasional (ILO) mengenai Prinsip-Prinsip dan Hak-Hak Mendasar di Tempat Kerja³. Kami juga berkomitmen pada Prinsip-Prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan Hak Asasi Manusia⁴, dan Asahi Group Holdings, Ltd. telah turut menandatangani Pakta Global Compact PBB, yang sepuluh prinsipnya kami junjung tinggi.

¹ Yang dimaksud dengan "Segenap pejabat dan karyawan masing-masing perusahaan Asahi Group" adalah para direksi, para komisaris, para pejabat eksekutif, orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan bisnis yang terkait dengan manajemen, maupun yang bertugas untuk mengawasi mereka, dan juga orang-orang yang melaksanakan pekerjaan berdasarkan kontrak kerja mereka dengan masing-masing perusahaan Asahi Group.

² Piagam Hak Asasi Manusia Internasional adalah sebutan untuk tiga dokumen hak asasi manusia yang diakui secara internasional: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia beserta dua perjanjian internasional terkait, yaitu Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Dokumen-dokumen tersebut dianggap sebagai standar umum yang disepakati secara internasional untuk semua orang dan semua bangsa, yang menetapkan hak asasi manusia mendasar yang dilindungi secara universal.

³ Deklarasi ILO mengenai Prinsip-Prinsip dan Hak-Hak Mendasar di Tempat Kerja menetapkan prinsip-prinsip mengenai hak-hak mendasar sebagai standar minimum perburuhan yang harus dilindungi: kebebasan berserikat dan hak berunding bersama, penghapusan segala bentuk kerja paksa atau kerja wajib, penghapusan perburuhan anak secara efektif, dan penghapusan diskriminasi sehubungan dengan ketenagakerjaan dan pekerjaan.

⁴ Prinsip-Prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan Hak Asasi Manusia yang didukung oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada tahun 2011 memberikan standar global otoritatif untuk tindakan terkait dengan hak asasi manusia dalam konteks bisnis, dan menerangkan apa yang diharapkan bagi pemerintah dan perusahaan untuk menangani dampak buruk terhadap hak asasi manusia yang timbul dari kegiatan usaha.

Kami akan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk bisnis kami di semua negara dan wilayah tempat kami melakukan kegiatan usaha. Apabila undang-undang negara/daerah tersebut berbeda atau bertentangan dengan standar hak asasi manusia internasional, kami akan mencari cara untuk dapat sejauh mungkin menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara internasional tanpa melanggar peraturan perundang-undangan setempat.

Komitmen pada Uji Tuntas Hak Asasi Manusia

Kami akan melakukan uji tuntas untuk mengidentifikasi, mencegah, dan menanggulangi dampak buruk terhadap hak asasi manusia yang dapat dikaitkan dengan kegiatan usaha kami, guna memenuhi komitmen kami pada Prinsip-Prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan Hak Asasi Manusia.

Kami akan berusaha untuk tidak melakukan pelanggaran hak asasi manusia, dan tidak ikut andil dalam pelanggaran hak asasi manusia yang seandainya dilakukan oleh para pemangku kepentingan, termasuk pemasok kami maupun mitra bisnis lainnya. Apabila kami menemukan bahwa kami telah menyebabkan atau ikut andil dalam pelanggaran tersebut, kami akan berusaha untuk memperbaiki dampak tersebut.

Kami percaya bahwa pandangan pemangku kepentingan yang terkena dampak sangatlah penting bagi kami untuk dapat mengenali siapakah pemangku kepentingan aktual atau potensial yang akan terpengaruh oleh kegiatan usaha kami, dan juga untuk dapat mencari tanggapan yang sesuai untuk menangani dampak tersebut. Kami akan berusaha untuk menjalin komunikasi dengan pemangku kepentingan terkait tepat waktu untuk memahami permasalahan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan bisnis kami, agar dapat mempertimbangkan pandangan mereka ketika menjalankan kegiatan usaha kami.

Permasalahan Hak Asasi Manusia yang Berkaitan dengan Bisnis kami

Kami menyadari bahwa menangani permasalahan hak asasi manusia dibawah ini dalam kaitannya dengan kegiatan usaha kami merupakan komponen penting dari tanggung jawab kami terhadap hak asasi manusia.

- **Diskriminasi:** Kami akan menghormati keberagaman dan hak asasi manusia tiap-tiap individu. Kami tidak akan mendiskriminasi atau melakukan tindakan apa pun yang merusak martabat tiap-tiap individu berdasarkan kebangsaan, ras, suku, agama, ideologi, jenis kelamin, usia, kecacatan, identitas gender, orientasi seksual, atau status pekerjaan, atau karakteristik-karakteristik lainnya yang dilindungi sebagaimana didefinisikan dalam peraturan perundang-undangan nasional/daerah.
- **Pelecehan:** Kami tidak akan mentoleransi pelecehan dalam bentuk apa pun, baik melalui kata-kata

maupun tindakan.

- Perburuhan Paksa dan Perburuhan Anak: Kami tidak akan terlibat dalam perburuhan paksa, perburuhan anak, atau segala bentuk perbudakan modern termasuk perdagangan manusia.
- Kebebasan Berserikat dan Hak untuk Berunding Bersama: Kami akan menghormati kebebasan berserikat dan hak untuk berunding bersama menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara dan daerah tempat kami melakukan kegiatan usaha. Apabila peraturan perundang-undangan negara/daerah tersebut membatasi hak kebebasan berserikat dan berunding bersama sehingga bertentangan dengan standar hak asasi manusia internasional, kami akan mencari cara untuk menghormati hak-hak ini dengan membangun sarana alternatif untuk dapat berdialog dengan karyawan.
- Kesehatan dan Keselamatan Kerja: Kami akan terus memastikan peraturan perundang-undangan mengenai kesehatan dan keselamatan di tempat kerja kami serta kondisi penerapannya, dan selalu berusaha untuk menjaga lingkungan kerja yang aman dan sehat.
- Jam Kerja dan Upah: Kami akan mematuhi semua peraturan perundang-undangan terkait jam kerja dan upah yang berlaku di negara dan daerah tempat kami melakukan kegiatan usaha. Kami akan berupaya mewujudkan upah yang memungkinkan karyawan kami untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka.
- Dampak dalam Rantai Pasokan: Kami akan berusaha memahami rantai pasokan kami termasuk mitra bisnis kami dan subkontraktor mereka. Kami akan menyosialisasikan Prinsip-Prinsip ini dengan para pemasok dan membuktikan serta menilai kepatuhan mereka. Kami juga akan berusaha untuk menjalin komunikasi dengan pemangku kepentingan terkait lainnya untuk mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia di seluruh rantai pasokan kami.
- Dampak dalam Masyarakat: Kami mengakui bahwa bisnis kami dapat berdampak pada hak asasi manusia dalam masyarakat, seperti hak guna tanah, akses air, kesehatan, dan hak-hak pribumi. Kami berkomitmen untuk menegakkan tanggung jawab kami terhadap hak asasi manusia dalam masyarakat tempat kami melakukan kegiatan usaha, dan berupaya untuk memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

Mekanisme Keluhan

Kami mendorong karyawan yang menemukan atau mencurigai adanya kemungkinan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara dan daerah tempat kami melakukan kegiatan usaha atau pelanggaran kebijakan internal kami untuk melaporkan kekhawatiran mereka kepada atasan

mereka dan/atau melalui pengaduan internal/sistem *whistleblowing* kami. Kami juga memiliki sistem penyelidikan di mana pemangku kepentingan eksternal Asahi Group dapat memberi tahu tentang pelanggaran atau tindakan yang mungkin melanggar Prinsip-Prinsip ini.

Karyawan atau pemangku kepentingan yang melaporkan atau memberitahukan kemungkinan pelanggaran tidak akan dirugikan dengan cara apa pun. Sebaliknya, laporan dan pemberitahuan mereka akan diterima dengan baik sebagai kesempatan bagi kami untuk meningkatkan transparansi kegiatan usaha Asahi Group, dan membantu memperkuat rasa saling percaya di antara kami dan para pemangku kepentingan kami.

Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas kami untuk mengidentifikasi dan menanggapi dampak hak asasi manusia yang timbul dari kegiatan usaha kami.

Pelatihan dan Peningkatan Kesadaran

Untuk menerapkan dan mematuhi Prinsip-Prinsip ini di seluruh Asahi Group, kami akan berupaya menerjemahkan Prinsip-Prinsip ini ke dalam bahasa yang relevan dengan negara dan daerah tempat kami melakukan kegiatan usaha serta memberikan pelatihan dan pendidikan kepada segenap pejabat dan karyawan kami.

Pemantauan dan Pelaporan

Kami akan terus melacak penerapan Prinsip-Prinsip ini, dan melakukan perbaikan sebagaimana diperlukan. Kami akan secara teratur mengungkapkan kemajuan kami dalam menerapkan Prinsip-Prinsip ini melalui situs web kami, Laporan Terpadu dan saluran komunikasi lain yang relevan.

Prinsip-Prinsip ini telah disetujui oleh Dewan Direksi Asahi Group Holdings, Ltd. pada tanggal 25 Maret 2021.

25 Maret 2021

Atsushi Katsuki

Direktur Utama dan CEO

Asahi Group Holdings, Ltd.